

Peran Infrastruktur dan Stabilitas Wilayah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi : Studi Regional Sumatera Barat

^{a*}Rusy Dina, ^bMuhammad Anshari, ^cAfriosya Syawitri

^{a,b,c} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: rusydina@unp.ac.id, muhammadanshari@unp.ac.id, afriosasyawitri@unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

19 Agustus 2025

Disetujui:

24 September 2025

Terbit daring:

30 November 2025

DOI: -

Sitasi:

Rusy, D., Anshari, M., & Syawitri, A. (2025). Peran infrastruktur dan stabilitas wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi: Studi regional Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 152–162.

Abstract

This study aims to examine the role of educational infrastructure, regional stability measured by the security level in West Sumatra, government expenditure, and public-sector employment on regional economic growth, particularly in West Sumatra. The data used in this study consist of panel data comprising time-series data from 2020 to 2024 and cross-section data from 19 regencies/municipalities in West Sumatra, obtained from the West Sumatra Central Bureau of Statistics. The analytical model employed in this research is panel data regression using the E-Views 10 software. The findings reveal that educational infrastructure has a significant effect, regional stability has a significant negative effect, and government expenditure has a significant effect, while public-sector employment does not have a significant impact on economic growth in West Sumatra. This study suggests that policymakers should optimize the role of educational infrastructure, strengthen regional security to enhance stability, and manage government budgets more equitably to generate a positive impact on the economy.

Keywords: *Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Pendidikan, Keamanan, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja Sektor Publik*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran infrastruktur pendidikan, stabilitas wilayah diukur dari tingkat keamanan wilayah Sumatera Barat, belanja pemerintah dan tenaga kerja sektor pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi regional khususnya Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan data time series tahun 2020-2024 dan data cross section 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan menggunakan program E-Views 10. Hasil penelitian ini menemukan bahwa infrastuktur pendidikan berpengaruh signifikan, stabilitas wilayah yang diukur dari tingkat keamanan berpengaruh negatif signifikan, belanja pemerintah berpengaruh signifikan, sedangkan variabel tenaga kerja sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Penelitian ini menyarankan kepada pemangku kebijakan bahwa perlunya memaksimalkan peran infrastruktur pendidikan, meningkatkan tingkat keamanan demi kestabilan wilayah serta pengelolaan anggaran pemerintah dengan lebih adil dan berdampak pada perekonomian.

Kata Kunci : *Economic Growth, Educational Infrastructure, Security, Government Expenditure, Public Sector Labor*

Kode Klasifikasi JEL: O47, H54, H55, J01, H50

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari kemampuan wilayah tersebut dalam memanfaatkan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur, stabilitas wilayah, belanja pemerintah daerah, dan kualitas sumber daya manusia sering diidentifikasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Esfahani & Ramírez, 2003). Ketidakstabilan, termasuk tingginya tingkat kriminalitas, dapat menurunkan kinerja ekonomi melalui berkurangnya investasi dan gangguan terhadap kegiatan produksi (Prakash et al., 2019).

Infrastruktur pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi karena berperan langsung dalam pembentukan modal manusia. Peningkatan jumlah sekolah sebagai sarana pendidikan formal dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas (Fleisher, Li, & Zhao, 2010; Glewwe & Jacoby, 2004). Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dapat mendorong produktivitas manusia dan menjadi investasi untuk jangka panjang terhadap kemajuan suatu negara. Peningkatan fasilitas pendidikan penting untuk dilakukan karena akan meningkatkan kualitas pendidikan serta mampu mendorong pembangunan ekonomi (Hota & Acharya, 2023). Pengembangan fasilitas pendidikan dan gedung sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mengarah ke menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas produksi dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Wahyudi et al., 2023).

Selain infrastruktur fisik, stabilitas keamanan di suatu daerah juga memiliki peran strategis. Penegakan hukum yang efektif, diukur melalui tingkat penyelesaian kasus kejahatan oleh kepolisian, tidak hanya meningkatkan rasa aman masyarakat, tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi atau kepemimpinan politik yang bermasalah cenderung mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi signifikan (Prakash et al., 2019; Amara, 2012).

Belanja pemerintah daerah juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat meningkatkan ketersediaan infrastruktur, memperbaiki layanan publik, dan mendukung program peningkatan kapasitas masyarakat. Belanja pemerintah dalam hal ini pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, fasilitas publik, pariwisata dan layanan publik lainnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2020 (Fatimah, 2023). Hal yang sama ditemukan oleh (Tang, 2022) bahwa belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah yang meningkat mempengaruhi persentase pertumbuhan ekonomi dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

Tenaga kerja sektor publik menjadi salah satu penggerak perekonomian. Pekerjaan sektor publik mempengaruhi produktivitas ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya manusia, mendorong inovasi, dan

menciptakan tenaga kerja yang terampil (Ncanywa, 2025). Penelitian menemukan bahwa tenaga kerja sektor publik di wilayah MENA mendistorsi pertumbuhan ekonomi dengan kelebihan staf dan salah mengalokasikan modal manusia yang menyebabkan produktivitas rendah sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat (Pissarides & Veganzones-Varoudakis, 2006).

Tabel 1. Data Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Pendidikan, Keamanan, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja Sektor Publik Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHK (Ribu Rupiah)	Infrastruktur Pendidikan (Jumlah Sekolah)	Keamanan (Persen)	Belanja Pemerintah (Ribu Rupiah)	Tenaga Kerja Sektor Publik (Jumlah Orang)
2020	611.403,59	5.392	171	17.782.351.574	81.715
2021	622.889,25	5.396	231	19.168.440.936	79.139
2022	641.195,88	5.450	147	19.609.901.004	76.024
2023	661.168.11	5.408	122	19.611.693.217	73.650
2024	679.824,49	5.429	143	20.839.501.417	92.047

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama periode 2020-2024 cenderung fluktuatif dan relatif meningkat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Infrastruktur Pendidikan, Keamanan, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Sektor Publik cenderung fluktuatif. Tahun 2020-2021 adalah masa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi. Namun secara akumulatif provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur pendidikan, tingkat keamanan sebagai indikator stabilitas wilayah dan belanja pemerintah daerah tahun 2020-2021 meski dalam keadaan pandemi COVID-19. Berbeda dengan kondisi tenaga kerja sektor publik tahun 2020-2021 mengalami penurunan jumlah dikarenakan banyaknya korban yang terdampak pandemi COVID-19 (Kompas, 2021). Selain itu, tenaga kerja sektor publik sudah banyak memasuki masa purna bakti atau pensiun pada tahun 2021 di beberapa daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Antara Sumbar, 2021).

Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga pariwisata. Namun, perbedaan ketersediaan infrastruktur, kondisi keamanan, kapasitas fiskal, dan kuantitas sumber daya manusia sektor pemerintahan di antara kabupaten/kota menyebabkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai peran infrastruktur dan stabilitas wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat menjadi relevan, terutama dengan mempertimbangkan empat variabel utama: infrastruktur pendidikan, keamanan, belanja pemerintah daerah, dan tenaga kerja sektor publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kelima variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan infrastruktur, stabilitas wilayah, dan kualitas sumber daya manusia sebagai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh sektor pemerintah berupa pengeluaran pemerintah dan produksi oleh pihak swasta. Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat ketika pengeluaran pemerintah juga meningkat sehingga tingkat produksi juga meningkat (Barro & Barro, 1988).

Pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berkembang dipengaruhi oleh infrastruktur pendidikan yang memadai dan modal manusia yang tinggi (Guliyeva et al., 2021). Penelitian oleh (Han, 2024) menyatakan bahwa infrastruktur pendidikan yang selalu ditingkatkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di China. Penelitian lainnya yang dilakukan di negara-negara Asia menemukan bahwa peningkatan infrastruktur pendidikan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi (Kamal et al., 2023). Selain itu penelitian (Orazem & King, 2007) menemukan bahwa peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, karena meningkatkan pasokan tenaga kerja terampil, adopsi teknologi dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh peningkatan infrastruktur pendidikan dan dampak infrastruktur pendidikan yang baik dan memadai terhadap pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Keamanan suatu daerah dapat menjadi pengaruh yang berarti untuk kemajuan perekonomiannya, karena rasa aman yang dimiliki masyarakat menandakan kesejahteraan dan adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menemukan bahwa keamanan secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Dao, 2011). Penelitian oleh (Yuan, 2008) menemukan bahwa ekonomi suatu negara tidak dapat mencapai pertumbuhan yang cepat jika keamanan masyarakatnya terganggu. Selain itu, peningkatan pengeluaran untuk keamanan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan meningkatnya PDB (Produk Domestik Bruto) di Guayas, Ekuador (Pozo Alegría, 2024). Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keamanan suatu wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonominya.

Pengeluaran pemerintah menurut teori Keynes menyatakan bahwa ketika pemerintah meningkatkan belanjanya, maka permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, produksi naik, tenaga kerja bertambah dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2019). Penelitian menemukan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (Zawawi et al., 2024). Menurut penelitian oleh (Sigdel, 2022)

menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi Nepal dengan mobilisasi belanja modal yang efisien untuk meningkatkan kegiatan pembangunan. Hal yang sama ditemukan oleh penelitian (Okoro, 2013) bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Tenaga Kerja Sektor Publik adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor pemerintahan. Menurut penelitian oleh (Higgins et al., 2007) bahwa tenaga kerja pemerintahan menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, karena melepaskan input tenaga kerja yang dipekerjakan pemerintah ke sektor swasta dapat meningkatkan pertumbuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ram, 2016) bahwa ukuran pemerintah yang lebih besar artinya tenaga kerja sektor publik yang semakin banyak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena inefisiensi dalam operasi dan beban fiskal yang mendistorsi insentif ekonomi yang berpotensi menurunkan produktivitas dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Hasil penelitian lainnya menemukan bahwa ukuran pemerintah dalam hal ini semakin banyaknya tenaga kerja di pemerintahan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Demir & Aktan, 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu tentang tenaga kerja sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja sektor publik memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang dikumpulkan meliputi infrastruktur pendidikan, stabilitas wilayah yang dilihat dari tingkat keamanan, belanja pemerintah, dan jumlah tenaga kerja sektor pemerintah untuk periode 2020-2024 yang mencakup 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat.

Variabel penelitian terdiri dari 5 yaitu satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel independen dilambangkan dengan X dan variabel dependen dilambangkan dengan Y. Variabel X1 adalah variabel infrastruktur pendidikan dengan indikator jumlah (unit) fasilitas pendidikan seperti sekolah program wajib belajar pemerintah di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Variabel X2 adalah stabilitas wilayah yang diukur dengan tingkat keamanan dengan data persentase (%) penyelesaian kejahatan oleh kepolisian di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Variabel X3 adalah belanja pemerintah dengan indikator realisasi belanja pemerintah daerah Sumatera Barat. Variabel X4 adalah tenaga kerja sektor publik yang indikatornya adalah jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Variabel dependen Y adalah pertumbuhan ekonomi dengan indikator rasio Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat satuannya persen.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Pendekatan data panel merupakan teknik analisis data yang menggabungkan data runtun waktu (time series) dengan data silang (cross section). Teknik analisis data panel memungkinkan peneliti untuk mengamati variasi antar unit analisis sekaligus perkembangan variabel dalam kurun waktu

tertentu. Pemilihan jenis model regresi data panel didasarkan pada tiga pengujian yaitu, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

Model regresi data panel dapat dituliskan seperti persamaan berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} - \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} - \beta_4 X_{4t} + e_t \dots\dots(1)$$

Dimana:

Y : Pertumbuhan Ekonomi
 X1 : Infrastruktur Pendidikan
 X2 : Tingkat Keamanan
 X3 : Belanja Pemerintah
 X4 : Tenaga Kerja Sektor Publik

Berdasarkan persamaan 1 di atas variabel pertumbuhan ekonomi (Y), infrastruktur pendidikan (X1), belanja pemerintah (X3), dan tenaga kerja sektor publik di ubah ke bentuk persamaan logaritma natural seperti berikut :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1t} - \beta_2 \ln X_{2t} + \beta_3 \ln X_{3t} - \beta_4 \ln X_{4t} + e_t \dots\dots (2)$$

Dimana

Ln : Logaritma
 β_0 : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi Variabel X
 e : disturbance error
 t : periode tahun (2020-2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil estimasi Uji Chow yang dapat dilihat pada Tabel 2 diperoleh nilai probabilitas *cross-section* F sebesar $0,000 < 0,05$, hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan model yang digunakan adalah *Fixed effect model*.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1016.212420	(18,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	526.439819	18	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews-10, 2025

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	94.740189	4	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews-10, 2025

Tabel 3 menunjukkan hasil Uji Hausman dengan nilai probabilitas *cross-section* random sebesar $0,000 < 0,05$ dan berdasarkan hasil uji hausman ini model yang tepat digunakan yaitu *Fixed effect model* (FEM) daripada *Random effect model* (REM). Dua pengujian model menunjukkan pendekatan FEM lebih cocok untuk regresi panel ini, maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier.

Hasil penelitian ini dapat dilihat dari estimasi regresi data panel yang ditunjukkan oleh tabel 4 hasil regresi data panel berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probab.
C	-0.8787	0.238058	-3.691138	0.0004
LnX1	0.0998	0.033157	3.010848	0.0036
LnX2	-0.006	0.002430	-2.646886	0.0100
LnX3	0.0301	0.009263	3.253426	0.0017
LnX4	-0.003	0.002584	-0.979321	0.3307
R ²			0.999429	
F-Statistik			5731.536	0.0000

Sumber : Olahan data eviews-10 2025

Pengaruh Infrastruktur Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa variabel X1 yaitu Infrastruktur Pendidikan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,0998 terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, yang mengindikasikan pengaruh positif, hal ini artinya ketika terjadi peningkatan pada infrastruktur pendidikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Guliyeva et al. (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh infrastruktur pendidikan yang memadai dan modal manusia yang tinggi di negara berkembang. Selanjutnya penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu Han (2024) yang menemukan bahwa infrastruktur pendidikan yang meningkat membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di China. Penelitian oleh Orazem & King (2007) menunjukkan hasil yang sama yaitu peningkatan infrastruktur pendidikan khususnya di daerah pedesaan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan pasokan tenaga kerja terampil, adopsi teknologi dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan.

Pengaruh Stabilitas Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Hasil estimasi menunjukkan nilai koefisien regresi variabel X₂ atau keamanan sebagai indikator stabilitas wilayah adalah sebesar -0,0064 terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketika keamanan yang diukur berdasarkan tingkat kasus kriminalitas yang telah diselesaikan oleh pihak kepolisian meningkat maka menurunkan pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut terjadi karena ketika kasus kriminal meningkat maka stabilitas wilayah menjadi terganggu yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Jothi Raj & Kalluru (2023) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kriminalitas berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di India. Selanjutnya penelitian oleh Ahmad et al. (2014) menemukan bahwa kejahatan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat kasus kejahatan yang ditangani oleh kepolisian dapat mengalihkan dana dari program pembangunan menjadi biaya yang dikeluarkan terkait dengan penuntutan dan hukuman, akibatnya kejahatan menyebabkan stagnasi atau pengurangan pendapatan hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Adenuga & Nor Azam, 2017).

Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Variabel X₃ merupakan belanja pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0301 dengan probabilitas 0,0017 artinya variabel belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha < 0,05$ terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. berdasarkan hasil temuan penelitian ini peningkatan pada belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. sejalan dengan penelitian oleh Zawawi et al. (2024) bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam jangka pendek. Penelitian lain juga menemukan hasil yang sama bahwa pengeluaran pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Nepal, karena adanya mobilisasi belanja modal yang efisien untuk meningkatkan kegiatan pembangunan (Sigdel, 2022). Selanjutnya hasil yang relevan juga ditemukan oleh Yu (2025) bahwa pengeluaran pemerintah secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Anhui.

Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Tenaga kerja sektor publik sebagai variabel X₄ mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -0,0025 dan tingkat signifikansi sebesar 0,3307 artinya, variabel tenaga kerja sektor publik berpengaruh pada tingkat α 1%, sedangkan pada α 0,05 tidak berpengaruh signifikan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ram, 2016) bahwa ukuran pemerintah yang lebih besar artinya tenaga kerja sektor publik yang semakin banyak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena inefisiensi dalam operasi dan beban fiskal yang mendistorsi insentif ekonomi yang berpotensi menurunkan produktivitas dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Penelitian lainnya juga sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa ukuran

pemerintah dalam hal ini semakin banyaknya tenaga kerja di pemerintahan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Demir & Aktan, 2016).

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur pendidikan dan belanja pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Sumatera Barat. Sedangkan, stabilitas wilayah yang diukur melalui tingkat keamanan berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kasus kriminal yang ditangani oleh kepolisian masih menjadi penghambat aktivitas ekonomi. Tenaga kerja sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) belum secara langsung mendorong peningkatan output ekonomi daerah khususnya Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi kebijakan dari penulis yaitu pemerintah perlu memperkuat pemerataan dan kualitas infrastruktur pendidikan dan meningkatkan efektivitas upaya penanganan dan pencegahan kriminalitas sehingga tercapai stabilitas wilayah yang menjadi pendorong penguatan ekonomi, serta mengoptimalkan belanja pemerintah pada sektor dengan efek pengganda tinggi. Selain itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan efisiensi birokrasi agar tenaga kerja sektor publik memberikan nilai tambah terhadap perekonomian. Penelitian ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan indikator yang lebih komprehensif serta pendekatan metodologis yang lebih lanjut.

DAFTAR RUJUKAN

- Adenuga, F. A., & Nor Azam, A. R. (2017). The Dynamic Relationship between Crime and Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Management and Economics*, 53(1), 47–64. <https://doi.org/10.1515/IJME-2017-0004>
- Ahmad, A., Ali, S., & Ahmad, N. (2014). Crime and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from Pakistan. *Social Science Research Network*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2421086
- Amara, Jomana. (2012). Implications of military stabilization efforts on economic development and security: The case of Iraq. *Journal of Development Economics* 99, 244–254. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.02.001>
- Barro, R. J., & Barro, R. J. (1988). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Social Science Research Network*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273578
- Dao, M. Q. (2011). Security and Development in Developing Countries. *Modern Economy*, 02(5), 874–879. <https://doi.org/10.4236/ME.2011.25098>
- Esfahani, Hadi Salehi., & Ramirez, Maria Teresa., (2003). Institutions, infrastructure, and economic growth. *Journal of Development Economics* 70, 443–477. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(02\)00105-0](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00105-0)

- Fatimah, S. (2023). Government Expenditure according to Functions and Economic Growth in Indonesia. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(5), 1933–1956.
<https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i5.3957>
- Fleisher, Belton., Li, Haizheng., & Zhao, Min Qiang. (2010). Human capital, economic growth, and regional inequality in China. *Journal of Development Economics* 92, 215–231.
- Glewwe, Paul., & Jacoby, Hanan G. (2004). Economic growth the demand for education: is there a wealth effect?. *Journal of Development Economics* 74, 33–51.
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2003.12.003>
- Guliyeva, A., Averina, L., Grebennikov, O., & Shpakov, A. (2021). *Regional gap in human capital: determinants of education and urbanization*. 301, 03004.
<https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202130103004>
- Kompas. (2021). <https://www.kompas.id/artikel/selama-juli-2021-252-pasien-covid-19-di-sumbar-meninggal/> diakses tanggal 26 November 2025.
- Han, Y. (2024). Research on Optimization Strategies for the Impact of Urbanization on Economic Development in the Education Sector in China. *Highlights in Business, Economics and Management*, 35, 203–210. <https://doi.org/10.54097/xwyrqg94>
- Hasan, M. U., Hassan, M. M., Ullah, S., & Nauman, M. (2024). Infrastructure and Economic Growth: Panel Analysis of Selected Asian Countries. *Journal of Human Dynamics*, 2(2), 153–161.
<https://doi.org/10.55627/jhd.02.02.01060>
- Higgins, M. J., Higgins, M. J., Higgins, M. J., Young, A. T., & Levy, D. (2007). Federal, State, and Local Governments: Do Any of Them Promote Growth? *Social Science Research Network*.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.1020450>
- Hota, S. P., & Acharya, S. N. (2023). Education Infrastructure, Expenditure, Enrollment & Economic Development in Odisha, India. *JIPM (Journal of Infrastructure Policy and Management)*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.35166/jipm.6.1.69-78>
- Jothi Raj, P. J., & Kalluru, S. R. (2023). Does crime impede economic growth? An evidence from India. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2196814>
- Kamal, A., Saad, M., & Ali, F. (2023). Role of Infrastructure, Financial Development, and Urban Population in Determining Economic Growth: An Analysis in Asian Countries. *Global Economics Review*, VIII(I), 50–58. [https://doi.org/10.31703/ger.2023\(viii-i\).05](https://doi.org/10.31703/ger.2023(viii-i).05)
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). New York, NY: Worth Publishers.
- Ncanywa, T. (2025). The impact of public sector employment on business strategies on economic growth. *The Business & Management Review*, 16(01).
<https://doi.org/10.24052/bmr/v16nu01/art-01>
- Orazem, P. F., & King, E. M. (2007). *Chapter 55 Schooling in Developing Countries: The Roles of Supply, Demand and Government Policy* (Vol. 4, pp. 3475–3559). Elsevier.
[https://doi.org/10.1016/S1573-4471\(07\)04055-7](https://doi.org/10.1016/S1573-4471(07)04055-7)
- Prakash, Nishith., Rockmore, Marc., & Uppal, Yogesh. (2019). Do criminally accused politicians affect economic outcomes? Evidence from India. *Journal of Development Economics*, 102370. Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102370>
- Pozo Alegría, J. E. (2024). Impacto de la Seguridad en el Crecimiento Económico de la Provincia del Guayas periodo 2014-2023. *Ciencia Latina*, 8(6), 4831–4845.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15205

- Pissarides, C., & Vegganzones-Varoudakis, M.-A. (2006). *Labor Markets and Economic Growth in the MENA Region* (Vol. 278, pp. 137–157). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0573-8555\(06\)78005-1](https://doi.org/10.1016/S0573-8555(06)78005-1)
- Ram, R. (2016). Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data. *The American Economic Review*, 79(1), 191–203. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:aea:aecrev:v:76:y:1986:i:1:p:191-203>
- Sigdel, S. (2022). *Public Spending and Economic Growth: A Study of Nepal During Fiscal Year 1990/91-2020/21*. <https://doi.org/10.3126/jkbc.v4i1.61424>
- Sumbar, Antara. (2021). <https://sumbar.antaranews.com/berita/444294/tahun-ini-310-pegawai-negeri-sipil-di-tanah-datar-memasuki-masa-pensiun?>. Diakses tanggal 25 November 2025.
- Tang, H. (2022). *The relationship between growth of government expenditure and economic growth year 2009 to 2020*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8hfp4>
- Wahyudi, H., Mulya, A. P., Husain, F. R., & Palupi, W. A. (2023). Basic Infrastructure and Economic Growth in Sumatra Province, Indonesia. *WSEAS Transactions on Systems*, 22, 73–86. <https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.9>
- Yuan, C. (2008). Public Security, Property Right Protection and Economic Growth. *Journal of Shijiazhuang of University of Economics*. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-HBDX200801021.htm
- Zawawi, S. N. A. B., Chong, S. H., & Li, T. (2024). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Malaysia. *Information Management and Business Review*, 16(3S(I)a), 240–249. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3s\(i\)a.4210](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3s(i)a.4210)
- Yu, X. (2025). Government Expenditure and Economic Growth: A Case Study of Cities in Anhui Province. *Frontiers Inhumanities and Social Sciences*, 5(7), 111–120. <https://doi.org/10.54691/y69fpy98>